



**TINJAUAN TERHADAP
PERKEMBANGAN PENERAPAN
CORPORATE GOVERNANCE
DI INDONESIA**

Oleh:
PROF. DR.H.KIRMIZI, SE, MBA, Ak

**PIDATO PENGUKUHAN
JABATAN GURU BESAR TETAP
DALAM BIDANG ILMU AKUNTANSI MANAJEMEN
PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS RIAU**

PEKANBARU, 25 SEPTEMBER 2010

Yang terhormat,

*Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia,
Bapak Ketua Senat dan Bapak/Ibu Anggota Senat Akademik
Universitas Riau,
Bapak Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Riau,
Bapak Rektor Universitas Riau,
Bapak/Ibu Pembantu Rektor Universitas Riau,
Para Dekan, Ketua Lembaga dan Unit Kerja, Dosen, dan
Karyawan
di lingkungan Universitas Riau,
Bapak dan Ibu para undangan, keluarga, teman sejawat,
mahasiswa, dan
hadirin yang saya muliakan.*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Mahaperkasa, Mahaadil, Mahabijaksana, Maha Mengetahui, Pencipta dan Penguasa Seluruh Alam Semesta serta Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, khususnya pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Akuntansi Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Seiring dengan itu shalawat dan salam dihadihkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Selanjutnya, izinkanlah saya menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada hadirin sekalian yang telah meringankan langkah dan meluangkan waktu menghadiri acara pengukuhan saya sebagai Guru Besar pada hari ini. Atas izin dan ridho-Nya perkenankan saya membacakan kepada Bapak/Ibu hadirin sekalian pidato ilmiah saya yang berjudul:

**TINJAUAN TERHADAP PERKEMBANGAN PENERAPAN
CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA**

1. Pendahuluan

Krisis Keuangan Global yang melanda sektor bisnis sejak tahun 2007/2008 ternyata lebih sulit dihadapi dibandingkan dengan masa krisis moneter yang terjadi sekitar tahun 1997/1998 yang lalu. Hal tersebut disebabkan pada saat krisis moneter terjadi tahun 1997/1998 hanya bersifat regional (lokal) sehingga hanya melanda kawasan tertentu saja, sedangkan krisis keuangan global bersifat mendunia atau global dimana Indonesia ikut merasakan bahwa peristiwa itu telah mewarnai kehidupan yang berdampak sangat memberatkan kehidupan bagi semua kalangan dan lapisan masyarakat. Kesulitan itu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat miskin saja notabene jumlahnya semakin bertambah dengan krisis tersebut, tetapi juga kalangan pelaku usaha pun tidak terkecuali ikut merasakannya. Jika kita tinjau kebelakang lagi saat krisis moneter yang terjadi tahun 1997/1998, pada saat itu negara kita bukan lagi hanya sekedar mengalami krisis keuangan, melainkan telah meluas menjadi krisis ekonomi. Hal ini ditandai dengan menciutnya produk domestik bruto (GDP) pada tahun 1998 itu menjadi minus 13,68 persen dibandingkan dengan 4,65 persen di tahun 1997, begitu juga dengan laju inflasi yang naik menjadi 77,63 persen pada tahun itu dibandingkan dengan hanya 11,05 persen di tahun sebelumnya (Siamat, 2004). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga mengalami penurunan menjadi sekitar Rp15.000 (Zhuang dkk. 2001), dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai titik paling rendah sejak masa pemerintahan Soeharto, yakni sebesar minus 13 persen (Kompas 2002).

Kita tentu ingat perusahaan-perusahaan raksasa seperti Goldman Sachs, Bear Stern, Morgan Stanley, Merrill Lynch, dan Lehman Brothers, mereka semua masuk ke dalam lima besar bank investasi di Amerika Serikat. Apa yang terjadi pada mereka? Setengah dari mereka sudah mengalami kebangkrutan. Lehman Brother, misalnya, pada tahun 2002 telah mencatat penjualan sebesar US\$6,155 juta dengan laba bersih US\$975 juta, dengan kata lain institusi tersebut telah memiliki kebijakan manajemen resiko yang

memberdayakan Komite Pasar Modal dalam pengambilan keputusan. Komite ini beranggotakan CEO dan para anggota eksekutif lainnya, pemimpin divisi resiko kredit, resiko pasar, dan pengukuran resiko untuk memastikan kerangka manajemen resiko diterapkan di seluruh kantor Lehman. Sepintas memang kelihatan sudah sangat memadai, dan mereka pun merasa sudah memiliki kebijakan dan strategi manajemen investasi yang komprehensif. Tetapi secara mengejutkan pada bulan September 2008 mereka melaporkan kerugian sebesar US\$4 miliar. Banyak analisis-analisis bermunculan dari berbagai kalangan baik dari pelaku bisnis, ekonom, maupun dari para analis keuangan sendiri, yang mengindikasikan bahwa pertama Lehman Brother melakukan investasi pada instrumen yang sangat beresiko dan yang kedua yang paling populer saat ini adalah bahwa Lehman Brother tidak menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten. Bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia? Praktek di Indonesia secara umum tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain, banyak muncul instrumen efek yang kreatif, meski masih ada ditemukan penyimpangan pengelolaan dana nasabah, sehingga yang diperlukan adalah memperkuat pengendalian internal serta melakukan pengungkapan yang memadai untuk keperluan pasar melakukan monitoring. Krisis keuangan dunia berdampak negatif terhadap Indonesia. Pengawas pasar modal telah mencabut izin beberapa perusahaan-perusahaan efek yang di antaranya Sarijaya Permana Sekuritas dan Antaboga Sekuritas. Perusahaan-perusahaan tersebut diindikasikan tidak menerapkan corporate governance yang baik .

Meskipun demikian penelitian Megginson, D'sonza, dan Nash (2005) menemukan hal yang positif terhadap perkembangan GCG di Indonesia, dimana mereka telah mendapatkan bahwa privatisasi BUMN saat ini telah mampu membangun praktek GCG lebih baik lagi yang mampu memicu peningkatan dan perbaikan kinerja. Temuan mereka mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan perubahan kepemilikan (*ownership*) terjadi setelah privatisasi dilakukan dimana semakin besar saham pemerintah yang dilepas, manajemen BUMN akan semakin lebih leluasa dan terfokus pada tujuan untuk

memaksimalkan keuntungan. Namun demikian jika privatisasi dilakukan dengan cara listing di pasar modal maka kewajiban untuk menerapkan transparansi serta *disclosure* semakin dituntut sehingga GCG semakin diwajibkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya, Simon Wong (2006) telah menemukan bahwa sebagian besar BUMN di negara berkembang memiliki kelemahan dari sisi penerapan *governance*, kelemahannya terletak pada *agency problem* yang dapat menimbulkan intervensi pemerintah yang cukup tinggi dalam pengelolaan BUMN. Selain itu, hak manajemen dalam BUMN dalam mengelola perusahaan secara bebas sering dikebiri karena kebanyakan pimpinan dalam perusahaan yang kadangkala dipilih berdasarkan kedekatan politik sehingga tidak bisa tampil mandiri. Disamping itu, terdapat juga masalah lain yang mengindikasikan minimnya alat (*tools*) dalam memberikan insentif dan menerapkan disiplin pada manajemen BUMN. Kelemahan dari sisi *governance* inilah yang selalu menyebabkan kinerja BUMN menjadi tidak kompetitif. Belajar dari kasus-kasus tersebut, berarti penerapan *good corporate governance* (GCG) dan pengendalian resiko di perusahaan belum optimal, padahal kreatifitas bisnis di pasar modal cenderung mengarah pada resiko yang sangat tinggi oleh karena itu penerapan GCG sangat penting, dan agar GCG dapat diterapkan secara efektif perlu didukung oleh penerapannya secara konsisten.

Hadirin yang saya hormati

Krisis keuangan global yang terjadi belakangan ini setidaknya telah menyebabkan lima negara yang harus meminta pertolongan IMF dalam menyelamatkan bisnis dan ekonominya yaitu Hongaria, Islandia, Pakistan, Ukraina, dan Belarusia. Oleh karena itu tentu ada baiknya kita mengkaji lebih dalam lagi tentang penyebab krisis yang melanda dunia dan Indonesia khususnya. Memang krisis yang terjadi belakangan ini, kita dihadapkan pada berbagai krisis lain akibat dari krisis financial yang dipicu oleh sektor properti di Amerika Serikat, seperti krisis pangan, krisis energi, serta krisis pasar komoditas yang melanda seluruh negara yang merupakan pemicu timbulnya

krisis ekonomi global, lantas apa yang menjadi akar permasalahan sesungguhnya yang terjadi?

Kita memang selalu lupa untuk menjaga keseimbangan dan kesinambungan dunia usaha yang membutuhkan *governance* yang baik. Dalam pasar financial yang mengglobal, bentuk keteraturan dan pengendalian yang ketat oleh organisasi bisnis selalu dilupakan, diabaikan, dan kadangkala hampir tidak ada. Dana yang mengalir deras antara satu bisnis ke bisnis yang lain tanpa mengenal batas negara, sepenuhnya hanya digerakkan oleh motif mencari untung yang sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat, bahkan tidak memperkirakan resiko yang terjadinya yang dapat sewaktu-waktu menjadi krisis ekonomi. Pasar financial global bisa jadi satu-satunya pasar yang tidak bersentuhan dengan regulasi. Dengan semakin terintegrasinya pasar, dana akan bebas bergerak dari satu pasar ke pasar yang lain, sehingga selalu terjadi otoritas keuangan di setiap negara kehilangan kemampuan dalam mengendalikan pasar. Salah satu contohnya adalah pasar derivatif keuangan, khususnya yang menyangkut *collateral debt obligation* (CDO) yang dalam penerbitannya terdapat rekayasa keuangan yang bisa digunakan untuk menyembunyikan resiko yang timbul dari aset yang berkualitas buruk. Akibatnya aset yang buruk, seperti *subprime mortgage*, menjadi mudah diperjual belikan karena telah bercampur dengan aset yang berkualitas baik. Terlebih lagi dengan adanya dukungan penilaian dari lembaga rating, harga aset yang buruk tersebut bisa menjadi terdongkrak dengan eksposur resiko yang semakin besar. Dalam pasar dengan penerapan *governance* yang baik atau tingkat penerapan *good corporate governance* yang tinggi, nilai aset yang buruk akan dapat diungkapkan, dan jika ada pembelinya tentu diperdagangkan dengan tingkat keterbukaan yang tinggi.

Dalam beberapa periode belakangan ini isu hangat yang selalu menarik perhatian para ekonom dan pelaku bisnis di Indonesia saat ini adalah tentang *Good Corporate Governance* (GCG). Sejak krisis finansial yang terjadi pada beberapa negara di tahun 1997-1998 yang

dimulai dari krisis yang terjadi di Thailand (1997), berikutnya Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hongkong dan Singapura yang akhirnya berubah menjadi krisis keuangan Asia ini dipandang sebagai akibat dari lemahnya praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di negara-negara Asia. Keadaan ini terjadi disebabkan oleh terdapatnya kondisi yang secara objektif relatif sama pada negara Asia tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan yang erat antara pemerintah dan pelaku bisnis, konglomerasi dan monopoli, proteksi, dan intervensi pasar sehingga membuat negara-negara di Asia tidak siap dalam memasuki era globalisasi dan pasar bebas (Tjager dkk., 2003). Selanjutnya, Baird (2000) pula mengemukakan bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *corporate governance* (tata kelola perusahaan) di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta. Dengan buruknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para pemilik modal menjadi turun karena investasi yang mereka lakukan menjadi tidak aman. Hal ini tentu akan diikuti dengan tindakan penarikan atas investasi yang sudah ditanamkan, sementara investor baru juga enggan untuk melakukan investasi. Dalam bulan Mei tahun 2005 yang lalu saja *Pricewaterhouse Coopers, Investment Management Association of Singapore* dan *Corporate Governance & Financial Reporting Center* telah melakukan survey bersama dan hasilnya menunjukkan bahwa 81% *institutional investors* yang disurvei lebih tertarik berinvestasi di Singapura dikarenakan oleh penerapan *corporate governance*nya telah membaik. Keengganan melakukan investasi atau menanamkan sejumlah dana yang besar di Indonesia tentu berpotensi akan menimbulkan kesulitan keuangan perusahaan jika tidak diiringi dengan penerapan GCG, sehingga pada akhirnya aktivitasnya jadi menurun dan dalam tahapan selanjutnya mengakibatkan lambatnya perputaran roda ekonomi secara keseluruhan.

Adanya beberapa kasus malapraktik keuangan di beberapa perusahaan dapat menyebabkan perusahaan dalam meneruskan

bisnisnya menimbulkan krisis pada akhirnya, salah satu penyebabnya adalah buruknya praktik *Corporate Governance (CG)*. Suprayitno dkk. (2004) menggaris bawahi bahwa karakteristik lemahnya praktik *CG* di Asia Tenggara ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu (1) adanya konsentrasi kepemilikan dan kekuatan *insider shareholders* (termasuk pemerintah dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pusat kekuatan), (2) lemahnya *governance* sektor keuangan, dan (3) ketidakefektifan *internal rules* dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas untuk berhadapan dengan pemegang saham mayoritas dan manajer.

Dengan demikian akhirnya tentulah penerapan *GCG* menjadi isu penting, terutama di Indonesia yang merasakan paling parah akibat krisis keuangan dan masih dirasakan dampak krisis tersebut sampai saat ini meskipun dalam keadaan yang dapat dikendalikan. Disamping itu, kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan emiten di pasar modal yang ditangani Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) semakin meningkat, hal ini menunjukkan rendahnya mutu praktik *GCG* di negara kita. Misalnya pada tahun 2001 telah terjadi *insider trading* (tindakan yang berperilaku buruk yang dilakukan orang dalam perusahaan pada proses transaksi saham) atas saham PT Bank Central Asia. Dengan mudah peristiwa ini dapat dilihat dari bentuk gejolak dalam transaksi dan pergerakan harga saham bank tersebut menjelang rencana divestasi. Diduga hal ini berhubungan dengan adanya pihak manajemen yang mengetahui serta memanfaatkan momentum penjualan saham kepada investor strategis untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi informasi. Praktik perdagangan dengan menggunakan hak akses informasi oleh orang dalam (*inside information*) ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap salah satu prinsip *GCG*, yaitu kewajaran (*fairness*). Kemudian kasus Bank Century yang baru-baru ini sangat menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan bahkan Internasional dimana telah terjadi ketidakjujuran para pemilik perusahaan dalam mengelola uang masyarakat dan tidak dijalkannya prinsip *GCG*, seperti pelanggaran pada prinsip

akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas.

Contoh lain yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah terungkapnya kasus *mark-up* laporan keuangan PT. Kimia Farma yang *overstated*, yaitu adanya penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (karena laporan keuangan yang seharusnya Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132 miliar). Kasus ini melibatkan sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi auditor perusahaan tersebut ke pengadilan, meskipun KAP tersebut yang berinisiatif memberikan laporan adanya *overstated* (Tjager dkk., 2003). Dalam kasus ini terjadi pelanggaran terhadap prinsip pengungkapan yang akurat (*accurate disclosure*) dan transparansi (*transparency*) yang akibatnya sangat merugikan para investor, karena laba yang *overstated* ini telah dijadikan dasar transaksi oleh para investor untuk berbisnis.

Meskipun demikian banyak kasus-kasus yang ditemui baik di Indonesia maupun negara-negara lain di dunia, World Bank telah mendapatkan hasil survey yang positif terhadap penerapan GCG. Hasil surveynya menunjukkan bahwa penerapan GCG telah menyebabkan perbaikan pada iklim bisnis, misalnya dalam hal pendirian usaha baru, percepatan pemberian izin usaha dari Kementerian Hukum dan HAM dan simplifikasi persyaratan usaha. Dengan demikian, urutan peringkat telah menurun dari total 175 negara, Indonesia berada pada posisi 135, turun 4 peringkat dibandingkan dengan tahun 2006. Disamping itu hal yang bertolak belakang dari hasil survey World Bank adalah survey yang dilakukan oleh *Asian Corporate Governance Association* tentang *prkatek corporate governance* di Asia dimana hasilnya telah memberikan penilaian bahwa semua indikator penerapan GCG di Indonesia ternyata berada di bawah rata-rata. Indikator yang digunakan meliputi prinsip dan *prkatek governance* yang baik, penegakkan peraturan, kondisi politik dan hukum, sistem akuntansi, serta kultur. Dari sini bisa diambil sebuah kesimpulan sementara bahwa penerapan *governance* yang baik di Indonesia dapat dikatakan sudah menunjukkan suatu kemajuan meskipun belum signifikan, namun

negara-negara lain nampaknya bertari lebih cepat lagi dibandingkan dengan Indonesia, karena mereka yakin bahwa dengan upaya menerapkan GCG, mereka akan sangat unggul dalam menarik investasi dan menjadi kunci dalam pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Dari laporan hasil survey tersebut disebutkan beberapa hal yang baik di Indonesia, pertama; walaupun kondisi pelaporan keuangan di Indonesia masih belum memadai, tetapi kualitas pelaporan keuangan kuartalan cukup bagus, kedua; ternyata Indonesia juga memiliki kerangka hukum yang paling *strict* dalam memberikan perlindungan untuk pemegang saham minoritas, khususnya dalam pelaksanaan *pre-emptive rights* (hak memesan efek terlebih dahulu), dan ketiga; gerakan anti-korupsi yang dilakukan pemerintah saat ini telah menunjukkan hasil yang cukup positif. Selain itu, penyempurnaan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* serta Pedoman GCG sektor Perbankan juga telah dilakukan di Indonesia. Tetapi menurut laporan tersebut, memang belum banyak yang percaya bahwa pemerintah cukup serius mendorong penerapannya.

Hadirin yang saya hormati

Sekilas Tentang Good Corporate Governance

Perilaku dan kinerja dunia usaha atau korporasi akan berdampak langsung bagi membaiknya fundamental dan kondisi makro perekonomian Indonesia. Kelemahan mendasar pada perekonomian di Indonesia terutama diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu: kinerja keuangan yang buruk, daya saing yang rendah, ketiadaan profesionalisme, tidak responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis, pengelolaan ekonomi dan sektor usaha yang kurang efisien serta sistem perbankan yang rapuh. Dalam berbagai analisis dikemukakan, ada keterkaitan antara krisis ekonomi, krisis finansial dan krisis yang berkepanjangan di berbagai negara dengan lemahnya *corporate governance*. Secara singkat *Corporate governance*

dapat diartikan seperangkat tata hubungan antara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004). *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

Sementara itu, *Cadbury Committee* (1992) mengemukakan bahwa *corporate governance* diartikan sebagai sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, dan selanjutnya *Forum of Corporate Governance for Indonesia* (FCGI, 2001) mendefinisikan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan (dengan kata lain sebagai sistem yang mengendalikan perusahaan) antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Secara sederhana *corporate governance* diartikan sebagai suatu sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan (*stakeholder*) dalam perusahaan. Pihak-pihak terkait dimaksud terdiri atas pihak internal yang bertugas mengelola perusahaan dan pihak eksternal yang meliputi pemegang saham, kreditur dan lain-lain. Idealnya pihak internal yang mungkin terdiri dari direktur, para pekerja dan manajemen akan menerima gaji dan imbalan lainnya dalam jumlah yang wajar; sementara para pemegang saham seharusnya menerima pengembalian (*return*) atas modal yang mereka investasikan. Kreditur akan memperoleh pelunasan atas pinjaman yang mereka berikan beserta bunganya; begitu juga halnya dengan pelanggan, mereka akan dapat memperoleh barang ataupun jasa yang ditawarkan perusahaan dengan harga yang wajar dan sebanding dengan uang yang mereka korbakan saat membeli; pemasok akan menerima

pembayaran atas barang atau jasa yang mereka serahkan kepada perusahaan dan bahkan masyarakat sekitarnya pun diharapkan akan memperoleh kontribusi sosial atau bentuk-bentuk manfaat yang lainnya. Tata hubungan yang sedemikian itulah yang ingin diwujudkan oleh *corporate governance*.

Di Indonesia, penerapan *Good Corporate Governance* telah dibuatkan pedomannya oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKKG) melalui bukunya yang dirilis pada tahun 2006 yang lalu berjudul "Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia". Perangkat Peraturan dan Perundang-undangan Surat Edaran Menteri BUMN No. 106 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri BUMN No. 23 Tahun 2000 yang mengatur dan merumuskan tentang pengembangan praktik *good corporate governance* dalam perusahaan perseroan, kemudian disempurnakan dengan KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN. Disamping itu juga telah dikeluarkan Keputusan Menteri BUMN No. 103 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komite Audit Badan Pengawas Pasar Modal melalui Surat Edarannya No. SE-03/PM/2000 telah merekomendasikan pada perusahaan publik untuk memiliki Komite Audit. Khusus untuk perbankan, termasuk juga bank BUMN, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum

Hadirin yang saya hormati, sebaiknya kita lihat Konsep dan Peranan Penerapan GCG dalam Pengembangan Usaha

Meskipun konsep *corporate governance* itu telah muncul bersamaan dengan timbulnya konsep mengenai korporasi, namun sebahagian besar ahli (antara lain Tjager dkk. 2003; Alijoyo dan Zaini 2004) berpendapat bahwa konsep ini belum tersosialisasi dengan baik sehingga belum terdapat pemahaman yang benar dan mendalam dan begitu juga manfaatnya, maka dirasa perlu untuk membahas secara singkat mengenai konsep dan peranannya dalam pengembangan usaha. Sebenarnya konsep *corporate governance*

bukanlah sesuatu yang baru, karena konsep ini telah ada dan berkembang sejak konsep korporasi mulai diperkenalkan di Inggris di sekitar pertengahan abad XIX (Solomon & Solomon, 2004). Teori korporasi pertama yang dikatakan sebagai teori induk dari berbagai teori mengenai korporasi adalah *Equity Theory*. Teori ini kemudian menurunkan berbagai teori lainnya, antara *Entity Theory* yang kemudian menurunkan pula *Agency Theory* yang menjelaskan bagaimana hubungan kontraktual antara pihak pemilik perusahaan (*principal*) yang

mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu guna meningkatkan kesejahteraannya dengan pihak manajemen/pengelola (*agent*) yang menerima pendelegasian tersebut. *Agency Theory* inilah yang kemudian memberikan landasan model teoritis yang sangat berpengaruh terhadap konsep *good corporate governance* di berbagai perusahaan di seluruh dunia. Kemudian konsep ini menjadi sangat populer dan bahkan dapat dikatakan telah menjadi isu sentral bagi kalangan pelaku usaha, pemerintah dan juga pihak-pihak lainnya. Selain itu masih banyak perusahaan, yang meskipun sudah beroperasi di pasar modal, menganggap bahwa *good corporate governance* itu hanya sebagai aksesoris belaka dan bukannya sebagai suatu kebutuhan mendasarkan guna mencapai sukses dalam menjalankan roda bisnisnya.

Menelusuri isu tentang peran GCG dalam dalam mengembangkan perusahaan-perusahaan di Indonesia, tentu kita harus melihat hasil kinerja perusahaan-perusahaan publik yang telah dicapai melalui penerapan GCG. Penilaian dimulai dari pokok-pokok kinerja yaitu dimulai dari pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (*compliance*), kesesuaian dengan standar dan *international best practice (conformance)*, hingga mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pemangku kepentingan, yang dapat diartikan sebagai pencapaian (*achievement*) yang ingin diraih dari penerapan GCG. Jika kita membaca hasil *Corporate Governance Perception Index 2007* yang dikeluarkan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, kita dapat melihat pencapaian dan

proses yang dilalui perusahaan Indonesia dalam menerapkan GCG.

Fenomena yang menarik yang kita lihat dalam penerapan GCG di Indonesia bahwa sektor perbankan menjadi sektor dengan peserta terbanyak, selain perdagangan dan jasa umum tentunya. Salah satu sebabnya karena perbankan memang merupakan industri yang highly regulated, sehingga kepatuhan dan sikap kehati-hatian telah terinternalisasi dalam praktik bisnis sehari-hari. Selain itu, fenomena sektor perbankan ini juga mengindikasikan pentingnya regulasi dan penegakannya dalam mendorong penerapan GCG. Partisipasi BUMN juga menarik untuk dikaji. Selain BUMN yang telah masuk bursa (go public), banyak 'wajah baru' yang berpartisipasi menunjukkan animo yang cukup baik dari kalangan perusahaan pelat merah ini.

Pada kategori umum, dua perusahaan yang mendapat penilaian tertinggi adalah bank, yaitu Bank Mandiri (mendapat skor 88,66 dalam skala 0-100) dan Bank Niaga (87,90). Sementara peringkat selanjutnya diisi oleh BUMN nonbank, yaitu Aneka Tambang (82,07).

Peringkat	Perusahaan	Skor	Predikat
1	Bank Mandiri	88,66	Sangat Terpercaya
2	Bank Niaga	87,90	Sangat Terpercaya
3	Aneka Tambang	82,07	Terpercaya
4	Adhi Karya	81,79	Terpercaya
5	United Tractors	81,53	Terpercaya
6	Tambang Batubara Bukit Asam	80,87	Terpercaya
7	Astra Graphia	80,30	Terpercaya
8	Kalbe Farma	79,70	Terpercaya
9	Bank BNI	79,46	Terpercaya
10	Bank Permata	78,85	Terpercaya

Sumber: IICG, 2007.

Ada sesuatu yang lebih yang diharapkan dalam penerapan GCG yang mereka terapkan:

1. Organisasi hidup untuk mengkreasikan nilai bagi lingkungannya jika organisasi tidak mampu lagi memberikan nilai tersebut maka akan hilang atau mati atau bahkan akan pindah dan berganti menjadi organisasi lain.
2. Untuk dapat mengkreasikan nilai organisasi perlu dikelola artinya organisasi perlu manajemen untuk membuatnya mampu mengkreasikan nilai dengan efisien. Perkembangan terbaru membuktikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien maka diperlukan instrumen baru yakni GCG
3. Diperlukan GCG untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik, tetapi organisasi berisi manusia-manusia atau individu-individu, GCG berjalan jika individu-individu secara internal mempunyai value atau sistem nilai yang mendorong mereka untuk menerima, mendukung dan melaksanakan GCG, adapun sistem nilai yang ada pada individu-individu, tumbuh didalam perusahaan yang digunakan sebagai sistem perekatnya disebut Corporate Culture (Djoko Santoso M,2005)

Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tahun 2007 bekerja sama dengan PT.Multi Utama Indojasa juga telah melaksanakan kajian tentang implementasi *Good Corporate governance* di sektor swasta, BUMN dan BUMD. Pengukuran implementasi GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness serta berdasarkan kerangka kerja GCG yaitu *compliance*, *conformance*, dan *performance*. Secara umum hasil studi ini menunjukkan bahwa tingkat implementasi GCG di perusahaan-perusahaan yang menjadi responden sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari Indeks GCG yang didapat, baik berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang mencapai angka 88,89 maupun berdasarkan kerangka kerja implementasi GCG (*compliance*, *conformance* dan *performance*) yang mencapai 90,41. Demikian juga untuk aspek *code of conduct*, pencegahan korupsi,

dan disclosure. Bagusnya angka indeks implementasi GCG ini dikarenakan sebagian besar (70%) responden merupakan perusahaan terbuka dan 46% merupakan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, yang dituntut untuk patuh dan terikat dengan berbagai ketentuan yang mengaturnya khususnya yang berkaitan dengan implementasi GCG.

Hasil studi menunjukkan implementasi di perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, baik perusahaan swasta BUMN/BUMD lebih baik dibanding perusahaan non lembaga keuangan. Selain itu, implementasi di perusahaan yang swasta lebih baik dibanding BUMN/BUMD. Demikian pula, perusahaan yang sudah terbuka (*go public*) lebih baik dibanding perusahaan yang belum *go public*. Berdasarkan prinsip-prinsip GCG, prinsip yang relatif lemah adalah prinsip tanggung jawab. Dari sisi Board, yang masih lemah adalah implementasi dalam pembentukan komite-komite fungsional di bawah Komisaris. Selain itu, yang juga masih lemah adalah komitmen implementasi GCG dalam bentuk belum ditandatangani berbagai pernyataan seperti pernyataan kepatuhan kepada Pedoman Perilaku dan Kontrak Manajemen, baik oleh manajemen maupun karyawan.

Jika dilihat berdasarkan kerangka kerja GCG, aspek yang masih lemah adalah aspek Studi Implementasi *Good Corporate Governance* di Sektor Swasta, BUMN dan BUMD *compliance* pada sisi Board dan *conformance* pada sisi Karyawan. Pada sisi Board, kelemahannya selain pada pembentukan komite-komite, juga pada implementasi pencegahan benturan kepentingan, dan peningkatan kerjasama dengan penegak hukum. Sedangkan pada sisi karyawan, masih berkaitan dengan penandatanganan pernyataan kepatuhan kepada Pedoman Perilaku dan Peraturan Perusahaan. Jika dilihat berdasarkan kelompok responden, aspek *compliance* cukup lemah pada kelompok perusahaan non lembaga keuangan. Rendahnya aspek *compliance* pada kelompok swasta non lembaga keuangan disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang belum melengkapi komite-komite fungsionalnya. Selain itu, yang masih juga kurang adalah tindakan komisaris terhadap (potensi) benturan kepentingan

yang menyangkut dirinya. Sebaliknya, aspek-aspek tersebut sangat diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, sehingga tingkat implementasi aspek *compliance* pada kelompok lembaga keuangan jauh lebih baik dibanding kelompok perusahaan non lembaga keuangan.

Hadirin yang saya hormati, Selanjutnya bagaimana Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance diterapkan Untuk Pengembangan perusahaan Publik

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 1998 silam telah mengeluarkan seperangkat prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan secara umum, hal ini mengingatkan bahwa prinsip-prinsip GCG ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, serta lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, prinsip yang universal tersebut akan dapat dijadikan pedoman oleh semua negara ataupun perusahaan, tetapi harus diselaraskan dengan sistem hukum, peraturan-peraturan/undang-undang maupun nilai-nilai yang berlaku di negara masing-masing bilamana diperlukan. Dalam Cadbury Report (1992), prinsip utama GCG adalah: keterbukaan, integritas dan akuntabilitas. Sedangkan, *Organization for Economic Corporation and Development* atau OECD, menyatakan prinsip dasar GCG berbentuk: kewajaran (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), dan tanggungjawab (*responsibility*). Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh GCG telah diterapkan dalam perusahaan. Dalam pidato saya ini, selanjutnya akan digunakan prinsip dasar menurut OECD.

Penjelasan ke empat prinsip dasar GCG di atas adalah sebagai berikut:

1. **Kewajaran** (*fairness*). Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-

hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (*fraud*) dan praktik-praktik *insider trading* yang dilakukan oleh agen/manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*).

2. **Akuntabilitas** (*accountability*). Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *Agency Problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.
3. **Transparansi** (*transparency*). Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sarna. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan teknologi informasi dan sistem informasi

akuntansi manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi; termasuk juga mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka (Tjager dkk, 2003). Dengan kata lain prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian (*disclosure*) informasi yang dimiliki perusahaan.

4. **Responsibilitas** (*responsibility*). Responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai GCG yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lainnya.

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengembangkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara lebih luas lagi yang bertujuan untuk:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk;

- a. menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan ;
- b. mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya ;
- c. memperoleh informasi yang relevan mengenai perusahaan secara berkala dan teratur ;
- d. dapat ikut berperan dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;
- e. memilih anggota dewan komisaris dan direksi, dan selanjutnya ;
- f. memperoleh pembagian keuntungan perusahaan/ deviden.

2. **Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham.**

Kerangka *corporate governance* harus dapat menjamin adanya perlakuan sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk para pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki, kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek-praktek *insider trading* dan *self dealing* serta mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).

1. **Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan.**

Kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha.

2. **Keterbukaan dan Transparansi.**

Kerangka *corporate governance* harus dapat memberikan jaminan adanya pengungkapan yang tepat waktu akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi tentang keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Selain itu informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan perusahaan.

3. **Akuntabilitas Dewan Komisaris (*Board of Directors*).**

Kerangka *corporate governance* harus dapat menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap

manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris serta *akuntabilitas* dewan komisaris terhadap perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Selain dari prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikemukakan oleh *The Organization for Economic Cooperation and Development*, perlu juga diketahui prinsip-prinsip *corporate governance* lain yang dikemukakan oleh *The Australia Stock Exchange (ASX)*. *The ASX Corporate Governance Council* yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002, dengan anggota terdiri dari perusahaan-perusahaan dan organisasi lain dari berbagai sektor bisnis di Australia. Organisasi ini membawa misi yaitu menciptakan kerangka dasar *good corporate governance* yang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi perusahaan publik, para investor, mereka yang bergerak dalam bidang pasar uang dan pasar modal serta masyarakat Australia.

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat menciptakan suasana kondusif bagi kelancaran operasi bisnis perusahaan, termasuk meningkatkan daya saing mereka. *Good corporate governance* menjadi salah satu daya tarik investor disamping itu juga dapat menjadi daya pikat para kreditor untuk mau meminjamkan dananya kepada peminjam seperti perusahaan-perusahaan swasta dan pemerintah. Walaupun demikian tidak ada jaminan bahwa setiap perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* akan terhindar dari kesalahan dan kegagalan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan faktor-faktor intern dan ekstern yang dihadapi oleh perusahaan. Meskipun prinsip-prinsip *good corporate governance* berhasil diterapkan pada suatu perusahaan tetapi belum tentu dapat berhasil juga jika diterapkan pada perusahaan lain, hal ini sangat bergantung pada banyak faktor yang dapat mempengaruhinya.

Peranan Good Corporate Governance Dalam Pengembangan Perusahaan Publik

Sejak Indonesia terperosok dalam krisis ekonomi beberapa tahun silam, maka good corporate governance menjadi bagian untuk pembenahan dan pengembangan pengelolaan perusahaan. Setiap emiten, direksi dan komisaris harus dengan tulus dan ikhlas bersedia menerpakan pada setiap gerak dari usaha mereka, yang dapat mencerminkan prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut. Namun apabila perusahaan-perusahaan merasa enggan menerapkannya, maka ada beberapa indikasi yang dapat menilai tentang penyebab manajemen kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketertutupan diri pengusaha, baik pemilik maupun manager;
2. Tidak mempergunakan kaedah-kaedah usaha dengan baik dalam mengerjakan usaha melainkan lebih menyenangkan lobi;
3. Kurangnya kesiapan menjadi *entrepreneur* yang mampu membawanya ke dunia usaha murni.

Hal ini dapat menyebabkan para *entrepreneur* jauh dari *good corporate governance*, sehingga tingkat kepercayaan dan kekuatan yang diterima dari relasi usaha rendah, oleh sebab itu mudah terombang-ambing gelombang perekonomian global, saat situasi usaha bekerja dalam kondisi perekonomian baik memang pengaruh ini tidak tampak namun apabila kondisi perekonomian kurang baik maka kehancuran perusahaan tidak dapat terelakkan lagi. Secara formal good corporate governance hanya ditujukan untuk perusahaan yang mempunyai status perusahaan publik, khususnya emiten yang telah menyerap dana dari masyarakat dan telah memiliki saham publik yang sifatnya minoritas dan independent dan secara sederhana dapat dilukiskan sebagai bentuk dari pelaksanaan tanggung jawab antara perusahaan sebagai badan hukum, direksi dan komisaris sebagai pengurus dengan para pemegang saham. Caranya dengan menjalankan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dalam rangkaian kewajiban untuk transparansi, bertanggung jawab, adil dan akuntabel.

Hadiri yang dihormati, jika ditinjau dari sisi Kepemilikan, pelaksanaan Governance, dan Manajemen perusahaan-perusahaan di Indonesia maka :

Indonesia adalah salah satu negara dimana peran negara dalam perekonomian relatif kuat, salah satunya, ditunjukkan oleh jumlah BUMN yang banyak, dan yang selalu menjadi topik pembicaraan atau perhatian masyarakat yang berkaitan dengan eksistensi BUMN di Indonesia adalah berhubungan dengan kepemilikan perusahaan-perusahaan milik negara (dalam hal ini apakah BUMN tersebut masih berbentuk perusahaan negara atau sudah berbentuk persero). Meskipun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, pada kenyataannya peran negara semakin hari terlihat semakin mengecil. Jika peran negara yang berlebihan dalam sistem ekonomi sering dianggap akan memunculkan berbagai macam distorsi yang berujung pada inefisiensi. Maka dari itu, ada semacam keyakinan pula bahwa salah satu langkah penting guna meningkatkan daya saing adalah mengurangi intervensi negara dalam ekonomi, yang dalam konteks kepemilikan terhadap BUMN ditunjukkan dengan kebijakan privatisasi. Tentu saja pandangan ini mengandung kebenaran, meskipun bukan kebenaran yang absolut. Jika dilihat dengan lebih mendalam, sebenarnya inti persoalan terletak pada berbagai macam mekanisme dan praktek intervensi yang berlebihan dari kekuatan politik dan birokrasi terhadap entitas bisnis, sehingga menggerogoti efisiensi. Maka dari itu, hal yang lebih mendesak untuk dibenahi sebenarnya adalah pelaksanaan *governance* di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan yang tergabung ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di Indonesia memang BUMN mempunyai peran yang strategis dalam memajukan perekonomian negara dan pengelolanya pun tidak sepenuhnya mementingkan aspek komersial tetapi lebih menekankan pada pelayanan publik. Oleh karena itu segala aspek yang berkaitan dengan kepemilikan, pelaksanaan *governance*, dan manajemennya selalu mendapat perhatian dari masyarakat. Sedangkan badan-badan usaha lainnya yang bukan

BUMN tentulah seharusnya dikelola secara profesional dengan lebih mementingkan dari aspek komersial, dan kehidupannya akan ditentukan oleh mekanisme pasar. Dengan demikian keberadaan BUMN sebagai salah satu bentuk dari peran negara dalam perekonomian bukanlah sesuatu yang selalu harus dipersalahkan. Inti masalahnya ada pada persoalan *governance*. Dan dalam banyak kasus, masalah *governance* sering tidak berhubungan dengan persoalan kepemilikan. Artinya, meskipun dimiliki oleh negara tetapi bisa juga dikelola dengan baik, sehingga menghasilkan kinerja yang baik.

Di negara-negara maju (OECD), di mana privatisasi terjadi secara masif, peran *State-Owned Enterprises* (SEOs) masih tetap penting. Pasca gelombang privatisasi di tahun 1980-an dan 1990-an, BUMN masih bernilai 20 persen dari total PDB. Di banyak negara, BUMN masih mampu menampung sekitar 10 persen dari total tenaga kerja, serta menguasai 40 persen dari kapitalisasi pasar di bursa-bursa saham. Secara historis, kuatnya peran BUMN ditandai dengan kebijakan Nasionalisasi terhadap seluruh perusahaan Belanda pada tahun 1959. Meskipun setelah itu terjadi dikembalikan lagi ke pemilik lama, tetapi hal itu menunjukkan betapa peran negara sangat penting dalam perekonomian.

Di Singapura peran BUMN justru dominan, ditunjukkan dengan keberadaan Temasek *Holdings (private) Limited*; sementara di Malaysia terdapat Khazanah Nasional Berhad yang juga penting peranannya dalam perekonomian. Kedua kelompok perusahaan (BUMN) ini memiliki kinerja dan daya saing yang baik. Dengan begitu, kita harus membedakan antara masalah kepemilikan (*ownership*) di satu sisi dengan masalah *governance* dan pengelolaan (*management*) di sisi yang lain. Kepemilikan oleh pemerintah tidak selalu menghalangi pengelolaan secara profesional, sehingga BUMN bisa juga kompetitif. Dalam konteks membangun protokol *good governance* di Kementerian Negara BUMN, fokus utamanya lebih pada perbaikan “*governance*” dan “*management*”, bukan semata-mata pada struktur kepemilikan. Kepemilikan hanyalah salah satu

komponen perbaikan kinerja dan daya saing. Dengan penerapan *good public governance* (GPG) dan *good corporate governance* (GCG) kepemilikan baik oleh swasta maupun oleh pemerintah akan menghasilkan kinerja yang baik. Prinsip GPG meliputi : Demokrasi, Akuntabilitas, Budaya hukum, Kewajaran dan kesetaraan. Sementara prinsip GCG meliputi : Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, serta Kewajaran dan kesetaraan. Mengenai pelaksanaan GPG, dalam sebuah negara dengan sistem demokrasi yang sudah matang, dengan didukung oleh akuntabilitas serta sistem hukum yang solid, serta menjunjung nilai kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), maka kebijakan pemerintah selalu bisa dipertanggungjawabkan dan cenderung mendorong pelaksanaan kerja manajerial yang mengedepankan kinerja dan daya saing. Namun, dalam situasi di mana sistem demokrasi dan budaya hukum masih belum terbentuk, seperti yang tengah terjadi di Indonesia, kebijakan pemerintah sering menimbulkan efek negatif bagi kinerja dan daya saing BUMN. Untuk itu, dalam rangka menuju BUMN yang berdaya saing tinggi, penerapan prinsip GPG sangat diperlukan.

Manfaat Good Corporate Governance

Kasus bangkrutnya perusahaan *Enron Corporation* di Amerika Serikat telah memberikan pelajaran penting terutama bagi para pelaku bisnis untuk lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. Bentuk kehati-hatian yang dimaksud digambarkan dengan dimasukkannya syarat-syarat pelaksanaan *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan yang didanai oleh lembaga-lembaga keuangan berskala besar, seperti CalPERS. Begitu juga, dana-dana internasional tidak diizinkan untuk diinvestasikan ke negara-negara yang standar *corporate governance* nya rendah. Dengan penerapan *corporate governance*, tidak hanya kepentingan para investor saja yang dilindungi, melainkan juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

Berbagai keuntungan yang diperoleh dengan penerapan *corporate governance* dapat disebut antara lain:

- 1) Dengan *good corporate governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan. Berbagai penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa penerapan *good corporate governance* akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif (Sakai dan Asaoka 2003; Jang Black dan Kim 2003).
- 2) *Good corporate governance* akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut. Chtourou dkk (2001) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa *Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia kinerja (earnings management)* yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangannya.
- 3) Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan ekspansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh McKinsey & Company (2002) membuktikan bahwa lebih dari 70% investor institusional bersedia membayar lebih (mencapai 26 – 30% lebih mahal) saham perusahaan yang menerapkan *corporate*

- governance* dengan baik dibandingkan dengan perusahaan yang penerapannya meragukan.
- 4) Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut pada poin 1, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Bagi negara, hal ini juga akan menaikkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang berarti akan terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Apalagi bila perusahaan yang bersangkutan berbentuk perusahaan BUMN, maka peningkatan kinerja tadi juga akan dapat meningkatkan penerimaan negara dari pembagian laba BUMN.
 - 5) Karena dalam praktik *good corporate governance* karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholder* yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap perusahaan.
 - 6) Dengan baiknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para *stakeholders* kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik. Hal ini tentu saja akan dapat menekan biaya (*cost*) yang timbul sebagai akibat tuntutan para *stakeholders* kepada perusahaan.
 - 7) Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan. Hasil penelitian Beasley dkk. (1996) dan Abbott dkk. (2000) menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Dengan berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat diberikan oleh penerapan *good corporate governance* sebagaimana disebutkan

di atas, wajar kiranya semua *stakeholders* terutama para pelaku usaha di Indonesia menyadari betapa pentingnya konsep ini bagi pemulihan kondisi usaha dan sekaligus tentunya pemulihan kondisi ekonomi kita secara nasional. Meskipun telah banyak upaya ke arah itu yang dilakukan, baik oleh pihak pemerintah sendiri, organisasi-organisasi *NGOs* serta para pelaku usaha, namun amat disayangkan hingga saat ini penerapan konsep *corporate governance* itu masih hanya sebatas mengikuti *trend* yang berkembang dan guna menunjukkan kepatuhan (*conformance*) atas ketentuan yang ditetapkan oleh berbagai institusi pemberi dana dan pemerintah. Seharusnya para pelaku usaha memandang dan menyadari bahwa *good corporate governance* merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi agar mereka dapat mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.

Kendala-Kendala Penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia

Aktivitas bisnis tidak akan terlepas dari kondisi lingkungan yang melandasinya. Begitu pula halnya dengan penerapan *good corporate governance* yang sudah tentu akan dipengaruhi oleh berbagai komponen yang ada di sekelilingnya. Komponen-komponen dimaksud, seperti hukum, budaya dan sebagainya ada yang bersifat mendukung, namun ada juga yang akhirnya menjadi kendala dalam aplikasinya. Alinea berikut ini akan menyinggung serba ringkas berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan *good corporate governance* di Indonesia.

1) Kendala Hukum

Corporate governance haruslah menjamin perlakuan yang sama dan perlindungan atas hak-hak semua pemegang saham dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan (*abuses*) oleh pihak-pihak tertentu. Di Indonesia, pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya hanya mempunyai sedikit celah untuk melindungi diri mereka terhadap tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemegang saham

mayoritas. Dalam sistem hukum kita mekanisme terhadap tindakan seperti itu memang ada diatur, tetapi karena masih lemahnya penegakan hukum dan praktik pengadilan (*judiciary*) maka efektivitasnya menjadi terbatas. Begitu juga halnya dengan sistem kepailitan dan pengadilan yang memiliki kelemahan telah membuat para kreditur hanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap para debitur mereka.

2) Kendala Budaya

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa terdapat suatu pandangan bahwa praktik *corporate governance* itu hanyalah merupakan suatu bentuk kepatuhan (*conformance*) terhadap peraturan atau ketentuan dan bukannya *Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia* sebagai suatu sistem diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Hal ini mengakibatkan aplikasi *good corporate governance* tidak sepenuh hati dilaksanakan, sehingga efektivitasnya menjadi berkurang.

Begitu juga halnya dengan adanya dan telah membudayanya anggapan bahwa tindakan penyelewengan (*fraud*) maupun transaksi dengan orang dalam (*insider transactions*) hanyalah merupakan hal yang biasa dan lumrah dilakukan dan bahkan tindakan korupsi pun dipandang sebagai sesuatu tindakan yang tidak salah. Anggapan yang seperti ini jelas bertentangan dengan jiwa *corporate governance*, sehingga akan mengganggu dan bahkan menghambat berjalannya aplikasi tersebut. Kondisi ini ditambah lagi dengan masih lemahnya praktik pengungkapan dan keterbukaan serta tidak efektifnya mekanisme pengungkapan dan kedisiplinan di pasar modal. Dalam beberapa kasus juga dijumpai fenomena bahwa para manajer dan direktur sangat kebal (*immune*) terhadap pertanggungjawaban kepada para *stakeholder*.

3) Kendala Politik

Kendala ini terutama terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu perusahaan yang dimiliki negara. Sebagaimana

dikatakan di atas bahwa pengertian negara selalu menjadi kabur, terkadang diartikan sebagai pemerintah, tetapi juga ada yang mengartikannya sebagai lembaga negara yang lain. Hal ini ditambah lagi dengan dikaburkannya pemisahan antara kepentingan bisnis dan kepentingan pemerintah maupun lembaga negara yang lain. Akibatnya berbagai keputusan bisnis di BUMN sangat diintervensi oleh pemerintah dan dalam kasus yang lain BUMN justru dieksploitasi oleh para politisi (Prasetiantono dalam Nugroho dan Siahaan 2005). Dalam beberapa kasus, hal ini juga terjadi pada perusahaan-perusahaan swasta. Kondisi lain yang mungkin dapat menjadi perhatian adalah bahwa peranan lembaga pasar modal (Bapepam begitu juga JSX) sebagai lembaga pengatur masih belum cukup kuat dalam menutupi kelemahan yang ada di pengadilan.

4) Kendala Lingkungan Bisnis

Sebagaimana kondisi yang umum berlaku di berbagai negara Asia lainnya, bahwa perusahaan-perusahaan (meskipun berbentuk perseroan) Indonesia terutama dimiliki oleh keluarga (*family-owned*). Dengan kondisi ini, maka praktik *corporate governance* dapat saja melenceng dari praktik yang seharusnya karena pertimbangan dan kepentingan keluarga, misalnya dalam penunjukan anggota komisaris independen. Keadaan ini dalam berbagai kasus juga tetap berlaku meskipun perusahaan-perusahaan tersebut sudah masuk dan memperdagangkan sahamnya di pasar modal (*publicly listed*).

5) Kendala Lainnya

Bank-bank di Indonesia telah diakui keberadaannya sebagai salah satu lembaga *intermediary* keuangan yang amat berperan dalam penyediaan (juga membantu dalam menyediakan) dana yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis. Sebagai penyedia dana (pinjaman) bank-bank tersebut semestinya berperan besar dalam memonitor aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas manajernya dalam penggunaan dana. Dalam berbagai kasus terlihat bahwa fungsi *monitoring* ini tidak berjalan secara efektif, bahkan hal itu sudah

terjadi selama proses penilaian terhadap proposal pinjaman yang diajukan. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus disetujuinya proposal kredit yang tidak/kurang *feasible* sehingga pada akhirnya menimbulkan masalah dalam pengembaliannya kemudian (kredit macet).

PESAN UNTUK DOSEN MUDA

Pesan saya untuk rekan-rekan staf pengajar yang lebih muda, apa yang telah saya kerjakan dan capai sampai dengan hari ini semoga menjadi contoh dan menjadi pemacu rekan-rekan semuanya agar lebih tekun mendalami ilmu akuntansi dan memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rekan-rekan tekuni. Masih banyak yang perlu kita lakukan untuk membangun pendidikan akuntansi di Indonesia. Saya yakin sekali bahwa dengan kemampuan dan kemauan serta tenaga yang dimiliki saat ini, apabila dengan sungguh-sungguh berikhtiar maka tentu hasil yang akan diperoleh akan lebih baik dari apa yang saya capai saat ini. *Insy Allah.*

Ketua Senat, Sekretaris Senat, para anggota Senat, dan hadirin yang saya muliakan, saya sangat bersyukur dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam mencapai puncak karier akademik saya sebagai guru besar.

Pertama-tama, izinkanlah saya sekali lagi memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan yang tiada terhingga kepada saya dan keluarga saya. Terima kasih ya Allah, atas nikmat iman, nikmat kesehatan, dan rezeki sehingga pada hari ini saya diberi amanah dan tanggungjawab yang besar menjadi Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini saya dan keluarga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan sehingga saya bisa mencapai jabatan Guru Besar ini. Saya menyadari bahwa untuk mencapai jabatan

akademik ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berbentuk moril maupun materiil, yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu. Oleh karena itu tanpa mengurangi penghargaan dan terimakasih pada berbagai pihak tersebut, saya mohon maaf sekiranya dalam ungkapan rasa terimakasih ini saya hanya menyampaikan kepada pihak-pihak tertentu saja.

Pertama saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Prof. Dr. Mohammad Nuh, MSc atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memangku jabatan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Akuntansi Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Riau yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49343/A4.5/KP/2010 tertanggal 31 Mei 2010. Saya berharap mampu untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan tersebut.

Selanjutnya saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Ashaludin Jalil, MS selaku Rektor/Ketua Senat dan seluruh anggota Dewan Guru Besar Senat Universitas Diponegoro yang telah menyetujui dan memproses pengusulan saya sebagai Guru Besar dalam ilmu akuntansi manajemen. Dalam kesempatan ini juga saya ucapkan terimakasih pula kepada Prof. Dr. Amries Rusli Tanjung, MM sebagai Peer person dalam penyempurnaan pidato pengukuhan ini.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dari saya sekeluarga juga disampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi, Drs. H. Kennedy, MM. Akt. , rekan-rekan Dekanat Prof. Dr. Isyandi, MSi. dan Drs. H. Zainal Abidin Zein, MM, serta Drs. Syapsan, MSi dan Drs. H. Tengku Arifin yang selalu memberikan motivasi kepada saya. Tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Riau yang telah membantu saya dalam proses pengusulan jabatan Guru Besar.

Secara khusus, saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau para pahlawan tanpa tanda jasa yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu

kepada saya, yaitu guru-guru dan dosen-dosen saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sejak saya bersekolah di SDN 21 Pekanbaru, di SMP Negeri I Ujung Batu Rokan Hulu, di SMPP 49 Pekanbaru, di Fakultas Ekonomi Universitas Riau, di Faculty of Business and Administration UKM Malaysia, dan sampai saya menempuh program doktor di University Sains Malaysia, Penang, Malaysia.

Juga kepada beliau Prof.Dr. Yuserie Zainuddin (selaku promotor utama pada saat menyelesaikan program Doktor di University Sains Malaysia) dan Prof Dr. Daing Nasir Ibrahim (selaku Dekan di School of Management USM Malaysia saat itu).

Terimakasih pula saya ucapkan kepada rekan-rekan Dosen dan karyawan di Fakultas Ekonomi yang telah membuat saya merasa nyaman bekerja dan berkarya. Khusus untuk rekan-rekan Dosen Jurusan Akuntansi, karena dukungan aktif dari Anda semualah saya bisa berdiri di sini dan Anda semua yang telah mewarnai karier saya sejak saya jadi dosen yunior hingga memangku jabatan Guru Besar ini. Tak lupa, khusus untuk sdr. Aci, terima kasih anda telah dengan sabar dan teliti membantu saya untuk mengumpulkan angka kredit, poin demi poin, hingga akhirnya angka kredit untuk menjadi Guru Besar terpenuhi.

Persembahan yang sangat istimewa dengan diiringi doa ketenteraman di alam barzah kepada kedua orang tua saya, Ayahanda H. Untung Ritonga (alm.) dan Ibunda Zainun Ahmad (almh.) yang telah mendidik saya sejak kecil hingga beliau tiada. Mereka berdua adalah yang mengajarkan dan memberikan contoh tentang tujuan hidup, makna dari hidup dan apa yang harus dilakukan ketika kita hidup. Semangat dan kesederhanaan dalam bekerja, berkarya, bergaul dengan sesama adalah petuah dan ajaran beliau berdua yang tiada berharga bagi saya. Juga kepada istriku Yunina Syafariaty, SE yang telah berjasa memberikan dorongan dan motivasi kepada saya pada awal karier saya sebagai dosen, awal saya berumah tangga sampailah saat ini, dan menjadi pendamping hidupku dengan setia baik dalam suka maupun duka dan anak-anakku yang tercinta Sarah

Maulida, Yuki Fadilah, dan Rifka Malinda. Dengan rasa haru, saya ucapkan terima kasih atas cinta, kasih sayang, dan doa yang telah kalian berikan untuk saya. Kalian semua telah banyak berkorban untuk Bapak sehingga tidak berlebihan kiranya jabatan Guru Besar ini kupersembahkan untuk Istri dan Anak-anakku semua dengan harapan semoga Allah SWT akan terus melimpahkan Rahmat dan kasih sayangNya kepada kita semua. Maha Besar Allah, yang telah melimpahkan suasana rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warohmah* yang sangat mendukung karier saya sampai saat ini.

Saya sampaikan pula rasa hormat dan terimakasih kepada Bapak mertua H.Ali Yacob (alm) dan Ibu mertua saya H.Halimah Ali (almh) yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan kesejukan hati saya untuk selalu konsisten dalam membina keluarga. Beliau berdua selalu mendoakan saya ketika saya sedang belajar dan bekerja. Juga kepada Kakakku Nursaidah, Eliyana, Mustariarty serta abangku Kiflan dan adikku Kirfizal sekeluarga, saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan dan motivasi yang diberikan kepada saya. Kalian semua telah dengan setia selalu memberikan dorongan kepada saya hingga saat ini saya bisa menjadi seorang Guru Besar seperti yang dicita-citakan oleh kedua orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang telah saya capai ini dapat menjadi tauladan buat keluarga besar kita semua dan kalian semua turut merasakan kebahagiaan ini.

Tidak lupa, rasa terimakasih juga saya sampaikan untuk semua rekan-rekan panitia yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu proses pengukuhan Guru Besar ini. Juga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, baik moril maupun materiil, sehingga acara ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Semoga Allah S W T membalas semua amal dan kebaikan yang telah Anda berikan kepada saya..... Amin.

Yang terhormat Ketua Senat, Sekretaris Senat, para anggota Senat, dan para hadirin semua yang saya muliakan,

Akhirnya saya sampaikan ucapan terimakasih atas kesediaan

dan kesabarannya mendengarkan pidato ini sampai selesai, disertai dengan permohonan maaf apabila ada tingkah laku dan tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para hadirin. Saya juga mohon doa restu agar dalam memangku jabatan Guru Besar yang terhormat tetapi penuh dengan tanggungjawab ini saya dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT selalu membimbing dan melimpahkan Taufiq, Rahmah, dan HidayahNya kepada kita semuanya.

Terimakasih dan *akhirul Kalam, Billahi Taufiq wal Hidayah, Wassalammualaikum Warrohmatullahi Wabarakaatu.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L. J., Parker, S., dan Peters, G. F., (2000), "The Effectiveness of Blue Ribbon Committee Recommendations in Mitigating Financial Misstatement: An Empirical Study," *Working paper*.
- Alijoyo, F. A., dan Zaini, S., (2004), *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, PT Indeks.
- Baird, M., (2000), "The Proper Governance of Companies Will Become as
- Chtourou, S. M., Bedard, J., dan Courteau, L., (2001), "Corporate Governance and Earnings Management," *Working Paper*, April Kompas, 31 Oktober, 2002.
- Siamat, D., (2004), *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Keempat, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Solomon, J.F., Solomon, A., dan Park, C. (2002), "The role of institutional investors in corporate governance reform in South Korea: Some empirical evidence," *Corporate Governance: An International Review*, 10 (3), July: 211– 224.
- Solomon, J., dan Solomon, A. (2004), *Corporate Governance and Accountability*, John Wiley & Sons, Ltd.
- Sulistiyanto, H.S., dan Wibisono, H., (2003), "Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia?" *Jurnal Widya Warta*, No. 2, Tahun XXVI.
- Tjager, I. N., Alijoyo, F. A., Djemat, H. R., dan Soembodo, B., (2003), *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT Prenhallindo.
- Zhuang, J., Edwards, D., dan Capulong, M. V. A., (editors) (2001), *Corporate Governance and Finance in East Asia, A Study of Indonesia, Republic of Korea*.
- FCGI. (2000). *Corporate Governance*. Forum for Corporate Governance in Indonesia. Jakarta.

- Financial Accounting Standard Board (FASB). (1978). Statement of Financial Accounting Concept No. 1. *The Objective of Financial Reporting*. American Accounting Association.
- Financial Accounting Standard Board. (1980). Statement of Financial Accounting Concept No. 2. *Qualitative Characteristics of Accounting Information*. American Accounting Association.
- Herwidayatmo. (2000). 'Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik di Indonesia'. *Majalah Usahawan*, Oktober, No.10/Th.XXIX
- Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1976). 'Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure'. *Journal of Financial Economics*. October. Vol. 3. pp. 305-360.
- Karn, Vernon. (1992). *Accounting Theory*. John Wiley and Son Inc. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 Tentang *Jasa Akuntan Publik*.
- Monks, R.A.G. and Minow, N. (1995). *Corporate Governance*. Blackwell Business. Oxford. UK.
- Organization for Economic Cooperation and Development. (2004) *OECD Principles of Corporate Governance*. The OECD Paris.
- Penmann, SH. (1988). 'An Empirical Investigation of the Voluntary Disclosure of Corporate Earning Forecasts'. *Journal of Accounting Research*. Vol. 18. Spring. pp. 132-160.
- Saudagaran, Sakhrok M., dan Diga, J.G. (1997). 'Financial Reporting in Emerging Capital Market: Characteristics and Policy Issues', *Accounting Horizon*, Vol 11, No. 2.
- Satyo, Nur Kurniawan. (2005). 'Sustainability Reporting: Paradigma Baru Pelaporan Perusahaan'. *Media Akuntansi*. Edisi 47, Tahun XII, Juli. Hal. 7 - 9.
- Scot, W.R. (1997). *Financial Accounting Theory*. Prentice-Hall. New Jersey.
- Shleifer, A. dan Vishny, R. (1997). 'A Survey of Corporate Governance'. *Journal of Finance*. Vol. 52. Hal.: 737 – 783.
- Soegiharto. (2005). 'Peran Akuntan Dalam Menegakkan Good Corporate Governance'. *Auditor*. Edisi 18. Hal. 38 – 41.

- Suprayitno G., Khomsiyah, GI, dan Sedarnawati Y. (2004). *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance*. The Indonesian Institute for Corporate Governance.
- Syakhroza, Ahmad. (2005). *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN. Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000 tentang: *Pengembangan Praktik Good Corporate Governance dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO)*.
- Tjager, I.N., A. Alijoyo H.R. Djemat, dan B. Sembodo. (2003). *Corporate governance: Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*. Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007. *Perseroan Terbatas Indonesia*.

CURRICULUM VITAE

I. Identitas (Data Pribadi)

1. Nama : Dr.Kirmizi, SE, MBA, Ak
2. Tempat/Tanggal lahir : 12 Juni 1962
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Jabatan Sekarang : Dosen Fakultas Ekonomi Univ. Riau
5. Agama : Islam
6. Status : Menikah
7. Alamat : (Rumah) Jl. Muslimin No 02, Komplek Dokagu, UIR, Marpoyan, Pekanbaru (Kantor) Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Jl.H.R.Subrantas Km 13 Pekanbaru
8. Hobby/Kegemaran : Bermain musik dan Berolah raga
9. Anak yang ke : 5 (lima) dari enam bersaudara
10. Orang tua : Ayah, Untung Ritonga (alm)
Ibu, Zainun Ahmad (almh)
11. Istri : Yunina Syafariaty, SE
12. Anak : Sarah Maulida
Yuki Fadilah
Rifka Malinda

II. Riwayat Pendidikan:

<u>Pendidikan</u>	<u>Tahun Lulus</u>	<u>Tempat</u>	<u>Pretasi</u>
1. Sekolah Dasar Negeri 21	1968 – 1974	Pekanbaru	Tamat
2. Sekolah Menengah Pertama No.1	1975 – 1977	Ujung Batu	Tamat
3. Sekolah Menengah Atas SMPP 49	1978 – 1981	Pekanbaru	Tamat

4. Strata 1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univ Riau 1981 – 1989	Pekanbaru*	Tamat
5. Strata 2 <i>Master Business Administration</i> – UKM M'sia 1996 – 1998	Bangi, Malaysia	Tamat
6. Strata 3 Doktor Bidang Akuntansi Manajemen – USM 1999 – 2002	Pineng, Malaysia	Tamat

III. Riwayat Organisasi

<u>Organisasi</u>	<u>Tahun</u>	<u>Tempat</u>
1. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Cabang Pekanbaru	1991 - sekarang	Pekanbaru
2. Anggota Asosiasi Dosen Indonesia	2008 – sekarang	Pekanbaru
3. Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi (IKAFE)	2004 – sekarang	Pekanbaru

IV. Riwayat Pekerjaan

<u>Pekerjaan</u>	<u>Tahun</u>	<u>Tempat</u>
1. PT.Perawang Lumber Industry	1989 – 1990	Pekanbaru
2. PT.Bank Danamon Cab.Pekanbaru	1991 – 1992	Pekanbaru
3. PT.Kharisma Refanzatama	1993 – 1993	Pekanbaru
4. Dosen Fakultas Ekonomi UR	1990 – sekarang	Pekanbaru
5. Sekretaris Program MM- UR	2002 – 2004	Pekanbaru
6. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Suska Riau	2002 – 2007	Pekanbaru
7. Kepala Divisi Perencanaan, Rekrutmen, Dan pelatihan pada Pusa Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2) UR	2004 – 2007	Pekanbaru
8. Komite audit PT.Bank Riau	Juni 2007 – sekarang	Pekanbaru
9. Komite audit PT.Surya Dumai Industry	2005 – sekarang	Pekanbaru

- | | | |
|--|-------------------------|-----------|
| 10. Dekan Fakultas Ekonomi UIN Suska Riau | 2007 – 2009 | Pekanbaru |
| 11. Tenaga Ahli Pansus Ranperda Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah SPR menjadi persroan Terbatas di Lembaga DPRD Provinsi Riau | Sept 2007 –
Des 2007 | Pekanbaru |

V. Penelitian

I. Penelitian

	<u>Judul</u>	<u>Lokasi</u>	<u>Tahun</u>	<u>publikasi</u>
1.	Mengendalikan karyawan dalam suatu Organisasi melalui Management Control System	Pekanbaru	2000	Jurnal Bisnis & Mgt Universitas Jambi
2.	Faktor-faktor kontekstual dan Sistem Akuntansi Manajemen	Riau	2000	Jurnal Kompak STIE Yogyakarta
3.	Pengaruh ketidakpastian lingkungan Terhadap penerapan Sistem Akuntansi Manajemen	BEI Jakarta	2001	Jurnal Mgt & Bisnis FE Univ.Syiah Kuala
4.	Pengaruh Intensitas persaingan terhadap Penilaian kinerja perusahaan-perusahaan Manufaktur di Daerah Riau	Riau	2001	Jurnal Mgt & Bisnis FE Univ.Syiah Kuala
5.	The effect of Perceived Environmental Uncertainty on Management Accounting Systems in Indonesia Manufacturing Companies	BEI Jakarta	2002	Jurnal Bisnis & Strategi FE Univ.Diponegoro, Semarang
6.	Pendataan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru	Pekanbaru	2004	Ditlingkungan PEMDA Kota Pekanbaru
7.	Penelitian dan Pendataan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Rokan Hulu	Rokan Hulu	2004	Ditlingkungan PEMDA Rokan Hulu
8.	Pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi dimoderasi oleh kepercayaan diri	Pekanbaru	2007	Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi - FE Univ. Trisakti JKT
9.	Determining the moderating effect of perceived environmental uncertainty-management accounting systems relationship in Indonesia manufacturing companies	BEI Jakarta	2008	Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia FE Univ. Islam Indonesia Yogyakarta
10.	Analisis kinerja keuangan perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebelum dan Sesudah Privatisasi di Indonesia	BEI Jakarta	2008	Jurnal Ilmu Adminis trasi Negara Fisip Univ. Riau

- | | | | |
|--|-----------|------|---|
| 11. Perbedaan persepsi antara Auditor dengan Jurusan Akuntansi terhadap Etika Profesi | Pekanbaru | 2009 | Jurnal Ekonomi FE Univ. Riau |
| 12. Pengaruh Kebijakan Corporate Governance, Pengungkapan, dan Peranan Audit terhadap Penerapan Corporate Governance pada Perusahaan-Perusahaan BUMD Provinsi Riau | Riau | 2009 | Jurnal Kiat FE Univ. Islam Riau Pekanbaru |

VI. Pelatihan, Workshop, dan Seminar

<u>Jenis Keikutsertaan</u>	<u>Tahun</u>	<u>Tempat</u>
1. Short course in Accounting theory	2001	USM Pineng, Malaysia
2. 42 Hours Short course in Management Accounting and Control Systems	2000	USM Pineng, Malaysia
3. Training & Workshop Financial Management & Capital	2002	Jakarta
4. Training Efektifitas Manajemen Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah	2002	Jakarta
5. Training Petunjuk Tehnis Pemeriksaan Perhitungan APBD dengan memberikan Opini Audit	2003	Medan
6. Lokakarya Technical Assistance Auditing: Good Governance	2001	Pekanbaru
7. Cooperative Education Workshop	2005	New Zealand
8. Training Fundamental Competencies of Audit Committee Profesional	2008	Jakarta
9. Training Enterprise Risk Management for Audit Committee Profesional, Batch III	2008	Jakarta
10. Seminar IT Risk Governance: Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Tehnologi Informasi	2008	Jakarta
11. Nara Sumber Workshop Pemberdayaan Komunitas Lokal dalam Rangka Otonomi Daerah	2007	Pekanbaru
12. Instruktur pelatihan Akuntansi Praktis bagi UKM dan Koperasi	2007	P2K2 UR
13. Pembicara Diskusi Panel dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan dalam Menggagas Dunia Kerja Output UIN Suska Riau	2007	Pekanbaru
14. Diskusi Panel "Peran FKK-Binamitra dlm Mewujudkan Sinergi Kemitraan di Univ. Riau	2004	Univ. Riau
15. Pertemuan Pimpinan Program Pasca Sarjana PTN se Indonesia	2004	Banjarmasin
16. Pelatihan "Strategi mendirikan Usaha"	2004	Univ. Riau

- | | | |
|--|------|-----------|
| 17. International Seminar on Islamic Economics and 1 st Congress of The Indonesian Association of Islamic Economic in Medan | 2005 | Medan |
| 18. International Simposium on Islamic Economics in Medan | 2005 | Medan |
| 19. Pelatihan Metode Penelitian | 2006 | Fekon UR |
| 20. Seminar Sinkronisasi Kurikulum Pendidikan Akuntansi pada Seminar Simposium Nasional Akuntansi IX | 2006 | Padang |
| 22. Lokakarya nasional “pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Akuntansi” Workshop “Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Komite-Komite | 2007 | Bandung |
| 23. Di bawah Dewan Komisaris pada Bank-Bank BPD | 2007 | Bandung |
| 24. Simposium Nasional Akuntansi Ke XI Workshop “Memilih Auditor Independen & Mengevaluasi Pelaksanaan Audit | 2008 | Pontianak |
| 25. Kantor Akuntan Publik (KAP)” Workshop “Pendalaman Pengelolaan Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Dan Komite nominasi & remunerasi | 2009 | Jakarta |
| 26. Workshop “Tugas Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, dan Komite Nominasi & Remunerasi: Tinjauan Pelaksanaan Tugas” | 2010 | Bali |

VII. Penerbitan Buku

- | | | |
|--|------|-----------|
| 1. Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Dan Kinerja Organisasi | 2009 | Pekanbaru |
| 2. Interpretasi Laporan Keuangan | 2009 | Pekanbaru |
| 3. Pedoman Penyusunan laporan Keuangan Untuk Koperasi dan UKM | 2010 | Pekanbaru |